

**PENGARUH KOMITMEN KARYAWAN DAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris pada DPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat)



Oleh:

FITRI ZALNI
88715/2007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH KOMITMEN KARYAWAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

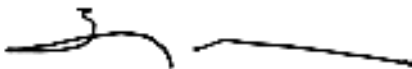
(Studi Empiris pada DPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat)

Nama : Fitri Zalni
NIM/BP : 88715/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Negeri Padang

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret
2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

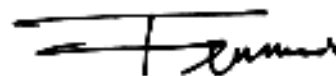
Padang, Februari 2013

Pembimbing I



Dr. Syamwil, M.Pd
NIP. 19590820 198703 1 001

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

PENGARUH KOMITMEN KARYAWAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA DPKD KOTA DI SUMATERA BARAT)

Fitri Zalni

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: fitriarshinta@gmail.com

ABSTRAK

Suatu keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi dan keadilan saja, namun faktor komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sangat menentukan kesuksesan dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka, dalam penelitian ini penulis ingin menguji pengaruh komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk menguji hipotesis ini penulis menggunakan data primer dengan cara menyebar kuesioner, yang disebar secara langsung ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota yang ada di Sumatera Barat. Setelah data dianalisis, ditemukan semua hipotesis dapat diterima. Untuk itu disarankan agar semua pihak yang ada dalam suatu instansi menyadari pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan instansi. Diharapkan juga pada semua instansi agar dapat mengambil langkah perbaikan dalam meningkatkan komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern yang mendukung sepenuhnya dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada suatu instansi pemerintahan. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan agar dapat meneliti di DPKD kabupaten di Sumatera Barat, atau meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Komitmen Karyawan, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

ABSTRACT

A successful financial management area is not only determined by the factors of production and justice only, but factors of employee commitment and implementation of the government internal control system are critical to the success in the financial management of regional finances. Thus, in this study the authors wanted to examine the influence of employee commitment and implementation of the government internal control system in the financial management area. To test this hypothesis the author uses primary data by spreading the questionnaire, which was distributed directly to the Office of Financial Management (DPKD) city in West Sumatra. Once the data is analyzed, it was found all the hypotheses can be accepted. It is recommended that all parties are in an agency aware of the importance of local financial management in achieving agency goals. It is expected also to all agencies in order to take corrective measures to improve of employee commitment and implementation of the government internal control system are fully supports the effectiveness of the financial management area at a government agency. For researchers who are interested in researching the same title, the researchers suggest in order to examine in DPKD districts in West Sumatra, or examine other factors that may affect the financial management area.

Keywords: Employee Commitment, Implementation of The Government Internal Control System, and Financial Management Area.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Menurut Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
- (2) Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.
- (3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
- (4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Menurut Ahmad (2004) asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- (a) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan kepatutan.
- (b) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Secara umum keberhasilan penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing melalui peningkatan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk faktor-faktor produksi dan keadilan. Disamping faktor produksi dan keadilan, masih terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu komitmen karyawan, sumber daya manusia, regulasi, dan perangkat pendukung.

Menurut Robins (1996) komitmen karyawan adalah suatu tingkat keyakinan sejauhmana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti memihakkan seorang karyawan pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen yang tinggi berarti memihakkan pada organisasi yang mempekerjakannya. Dalam Azhar (2008) regulasi, komitmen karyawan, sumber daya manusia dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 UU tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berhasilnya pedoman pengelolaan keuangan daerah terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan benar.

Selain itu, sistem pengendalian intern pada pemerintah juga sangat diperlukan guna mendapatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah

proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan kenyamanan yang memadai bagi terciptanya pengamanan aset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah.

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara efektif maka kedua faktor tersebut yaitu komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah haruslah diperhatikan. Hal ini penting diteliti untuk mengingat jika disuatu instansi pemerintah masih rendahnya komitmen karyawan dan lemahnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan baik.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Padang, Panitia khusus (Pansus) III DPRD Kota Padang yang membahas APBD tahun 2011, menyoroti kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Sebab, dari 50 kegiatan di instansi tersebut selama 2011, terdapat 11 kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 60 persen. Akibat banyaknya kegiatan yang realisasinya rendah, berakibat munculnya sisa dana yang besar dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Kegiatan tersebut diantaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional, dari anggaran Rp16,5 juta, terealisasi Rp7,3juta atau 44,6 persen. Kemudian, kegiatan pengendalian dan penyusunan DPA, dianggarkan Rp257 juta, namun terealisasi Rp79,1 juta (30,8 persen). Serta, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2012, dianggarkan Rp91,2 juta, terealisasi keuangan Rp18 juta (19,7 persen). Tingginya Silpa dalam anggaran ini,

harus menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran ke depannya. Seharusnya dengan adanya komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat memberikan wujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. (<http://www.harianumumsinggalang.com>).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti Refnaldi (2011) yang menyatakan bahwa komitmen karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan juga merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Febrinaldo (2011) yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan responden pegawai DPKD Kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”**. (*Studi Empiris Pada DPKD Kota di Sumatera Barat*)).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat. (tabel 1). Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai DPKD yang terdiri dari kasubag dan staf keuangan. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Propositional stratified random sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data subjek. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari

instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil olahan data, hasil uji normalitas menunjukkan level signifikan masing-masing variabel lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian dapat dinyatakan data dari ke tiga variabel penelitian terdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi berganda. (Tabel 2).

Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$. Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan $Tolerance$. Masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dan model ini layak digunakan dalam analisis regresi berganda. (Tabel 3).

Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas digunakan uji *Glejser*. Apabila nilai $sig > 0,05$ maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas. Variabel komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai $sig > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak digunakan dalam analisis regresi berganda. (Tabel 4).

Hasil Penelitian

Dari pengolahan data statistik, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 12,264 + 0,466X_1 + 0,513X_2$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 6,979. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen yaitu komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern

pemerintah adalah nol, maka nilai pengaruh pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar konstanta 12,264.

b. Koefisien Regresi (β) X_1

Koefisien komitmen karyawan sebesar 0,466 ini berarti bahwa dengan meningkatnya komitmen karyawan satu satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,466.

c. Koefisien regresi (β) X_2

Koefisien transparansi sebesar 0,513 ini berarti bahwa dengan meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah satu satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,513. Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai terhadap pengelolaan keuangan dapat dilakukan komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F_{hitung} = 45,516 > F_{tabel} = 3,15$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. (tabel 5).

Untuk pengujian koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 59,3% sedangkan sisanya 40,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. (Tabel 6).

Untuk mengungkapkan pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini digunakan terdiri dari dua variabel dependen yaitu komitmen karyawan (X_1) dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) dan satu variabel independen yaitu pengelolaan keuangan daerah (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam

pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam (Tabel 7).

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7. Koefisien Regresi Dan Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.264	6.063		2.023	.048
	Komitmen Karyawan	.466	.190	.243	2.457	.017
	SPIP	.513	.082	.616	6.244	.000

a. Dependent Variable: PengelolaanKD

Pembahasan

Pengaruh komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 16 diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,593 atau 59,3% pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan variabel lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 40,7%. Dari hasil uji F (hipotesis 1) dapat dilihat $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $45,516 > 3,15$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2007) yang menyatakan

bahwa regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 tahun 2006 UU tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, berhasilnya pedoman pengelolaan keuangan daerah terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan benar.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Febrinaldo Saputra (2011) yang menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah selain komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang hanya memiliki kontribusi sebesar 59,3%. Selain itu, variabel independen yang ada dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh komitmen karyawan terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) disimpulkan komitmen karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikannya. Pengaruh antara Komitmen karyawan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik Komitmen karyawan maka pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin efektif.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2007) yang menyatakan bahwa regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 tahun 2006 UU tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, berhasilnya pedoman pengelolaan keuangan daerah terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan benar.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa komitmen karyawan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuisioner yang disebarkan yang menunjukkan nilai rerata TCR 83,6%, itu artinya secara keseluruhan responden menjawab setuju bahwa komitmen karyawan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dari pernyataan diatas jelas menunjukkan bahwa pegawai DPKD saat ini memiliki komitmen yang tinggi dimana pegawai akan memandang pekerjaan bukan sebagai beban atau kewajiban tetapi sarana berkarya dan mengembangkan diri, karena seorang karyawan akan sangat berperan dalam menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dapat terwujud dengan semestinya.

Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung}=6,244$ dan nilai signifikan 0,000. Pengaruh antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan Amien (2010) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian intern yang memadai secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi, asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Febrinaldo Saputra (2011) yang menemukan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dilihat dari distribusi frekuensi, sistem pengendalian intern telah terlaksana dengan baik, dilihat dari nilai rerata TCR sebesar 86,30%. Dalam kenyataannya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien telah memadai.

Saat pemerintah daerah telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dalam pemerintahan maka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan meningkat. Hal ini didasarkan pada tujuan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah.

Dari semua pernyataan diatas menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang memadai pada pemerintah akan berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan keadaan yang terjadi pada saat ini dimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dikategorikan baik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh hasil penelitian ini adalah komitmen karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada DPKD Kota di Sumatera Barat.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran bahwa Untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan daerah yang efektif maka instansi perlu untuk melaksanakan komitmen karyawan

yang cukup baik, selain itu juga diperlukan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya, apabila menggunakan kuisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisioner dimodifikasi, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Yani. 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Amar. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 pada Pemerintahan Kota Banda Aceh. *Tesis Universitas Sumatera Utara*. Medan

Amien, Muhammad Sjukrul. 2010. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di Provinsi Sumatera Barat, Melalui (www.SumateraBarat.Prov.go.id) [(06/04/2011)]

Azhar. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Tesis Universitas Sumatera Utara*. Medan

Febrinaldo Saputra. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi FE Universitas Negeri Padang*. Padang

Domai, Tjahjanulin. 2002. "Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah". Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Refnaldi. 2011. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi FE Universitas Negeri Padang*. Padang

Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Alih bahasa Hadyana Pujatmaka. Jakarta: Prehallindo

Dokumen dan Literatur Penunjang

Peraturan Pemerintah, Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* Melalui (www.google.com) [08/04/2011]

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [08/04/2011]

LAMPIRAN

Tabel 1. Daftar Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat

No	DPKD (Kota)	Jumlah Pegawai	Responden
1.	Padang	40	11
2.	Bukittinggi	30	9
3.	Pariaman	31	9
4.	Padang Panjang	35	10
5.	Payakumbuh	44	12
6.	Solok	35	10
7.	Sawahlunto	34	10
	Jumlah	249	71

Tabel 2. Uji Normalitas

		KomitmenKaryawan	SPIP	PengelolaanKD	Standardized Residual
N		62	62	62	62
Normal Parameters ^a	Mean	37.6935	64.6613	63.0161	.0000000
	Std. Deviation	2.42655	5.59550	4.66058	2.92263912
	Most Extreme Differences				
	Absolute	.161	.160	.167	.112
	Positive	.161	.160	.167	.112
	Negative	-.117	-.097	-.098	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.267	1.259	1.318	.881
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081	.084	.062	.420

a. Test distribution is Normal.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.264	6.063		2.023	.048		
	KomitmenKaryawan	.466	.190	.243	2.457	.017	.684	1.462
	SPIP	.513	.082	.616	6.244	.000	.684	1.462

a. Dependent Variable: PengelolaanKD

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.332	3.686		.361	.719
	KomitmenKaryawan	-.061	.115	-.083	-.529	.599
	SPIP	.050	.050	.157	1.007	.318

a. Dependent Variable: AbsUt

Tabel 5. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	803.933	2	401.966	45.516	.000 ^a
	Residual	521.051	59	8.831		
	Total	1324.984	61			

a. Predictors: (Constant), SPIP, KomitmenKaryawan

b. Dependent Variable: PengelolaanKD

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 ^a	.607	.593	2.97176

a. Predictors: (Constant), SPIP, KomitmenKaryawan

b. Dependent Variable: PengelolaanKD

KUESIONER

KUESIONER IDENTITAS RESPONDEN

No. Responden : (Diisi oleh peneliti)

Nama Kantor : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Jabatan : Kasubag
 Staf

Pendidikan Terakhir : SMA
 D3
 S1
 S2
 Lain-lain (.....)

Lama Bekerja : < 5 Tahun
 ≤ 10 Tahun
 >10 Tahun

Jurusan : Akuntansi
 Manajemen
 Hukum

Kursus yang pernah diikuti :

Lain-lain (.....)

Komputer

Bahasa Inggris

Pajak

Lain-lain (.....)

Petunjuk pengisian kuesioner

Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohonkan menjawab pertanyaan tersebut dengan memberi *check list* (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

S : Selalu
 SR : Sering
 K : Kadang-Kadang
 P : Pernah
 TP : Tidak Pernah

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Y)

NO	PERTANYAAN	SL	SR	K	P	TP
	Perencanaan Keuangan Daerah					
1	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
2	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
3	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir					
	Pelaksanaan Keuangan Daerah					
4	Setiap perangkat daerah yang bertugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan daerah					
5	Semua manfaat yang bernilai uang merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD					
6	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
7	Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang APBD					
8	Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi oleh pejabat yang berwenang					
9	Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah					
	Pelaporan Keuangan Daerah					
10	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan					
11	Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi					
12	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum					
	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					
13	Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD					
14	Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik					
	Pengawasan Keuangan Daerah					
15	Pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD					

2. KOMITMEN KARYAWAN (X₁)

NO	PERTANYAAN	SL	SR	K	P	TP
1	Saya berkeinginan memberikan segala upaya yang ada untuk membantu instansi ini menjadi sukses					
2	Saya membanggakan instansi ini kepada teman-teman saya sebagai instansi yang baik untuk bekerja					
3	Saya menerima hampir setiap jenis penugasan pekerjaan agar tetap bekerja pada instansi ini					
4	Saya menemukan bahwa idealisme yang saya inginkan dimiliki oleh instansi ini					
5	Saya bangga mengatakan kepada orang lain bahwa saya bekerja di instansi ini					
6	Instansi ini memberikan peluang yang terbaik bagi saya dalam meningkatkan kinerja pekerjaan					
7	Saya merasa bahwa pilihan saya untuk bekerja pada instansi ini sangat tepat dibandingkan dengan instansi lain yang sudah saya pertimbangkan sebelumnya					
8	Kepedulian saya terhadap masa depan instansi dimana saya bekerja sangat besar					
9	Bagi saya instansi ini adalah yang terbaik dari semua kemungkinan instansi yang dipilih untuk bekerja					

3. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (X₂)

No.	Pertanyaan	SL	SR	K	P	TP
1	Instansi memiliki kode etik tertulis dan semua aparat mengetahuinya.					
2	Adanya contoh dari pimpinan untuk berperilaku etis dengan mengikuti kode etik.					
3	Satuan pengawasan intern terdiri dari staf yang kompeten, dapat dipercaya dan tanggap dengan perubahan.					
4	Pembagian tugas dan jabatan terstruktur dengan baik.					
5	Adanya metode penilaian/pengukuran resiko dan sistem informasi manajemen resiko.					
6	Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi resiko.					
7	Adanya pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko.					
8	Adanya penetapan kebijakan pemisahan tugas yang memadai.					
9	Adanya otorisasi yang sesuai dan memadai atas aktivitas.					
10	Adanya pemeriksaan yang independen terhadap kinerja.					
11	Kurangnya identifikasi dan pengkomunikasian informasi agar tanggungjawab dapat dilaksanakan.					
12	Adanya sistem informasi yang berfungsi dengan baik dapat membantu meyakinkan bahwa tanggung jawab telah dilaksanakan.					
13	Kebijakan bahwa informasi harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan supaya dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memerlukan sulit diterapkan.					
14	Adanya pengawasan secara terus menerus dan periodik.					
15	Adanya pengawasan untuk menilai kualitas pengendalian intern.					